

HASIL SURVEI OMBUDSMAN NASIONAL: BALI MINIM MALADMINISTRASI

Senin, 07 Januari 2019 - Dewa Made Krisna Adhi

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kepala [Ombudsman Republik Indonesia](#) (ORI) Perwakilan [Bali](#), Umar Ibnu Alkhatab mengatakan bahwa Provinsi [Bali](#) terbebas dari kegiatan [maladministrasi](#).

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan [ORI](#) secara nasional yang menemukan bahwa [Bali](#) sangat minim kegiatan [maladministrasi](#).

"Bali sangat minim [maladministrasi](#), bahkan zero [maladministrasi](#)," jelasnya saat ditemui awak media di kantornya, Senin (7/1/2019).

Oleh karena itu, pihaknya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah di [Bali](#) yang mempunyai komitmen untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Pemda di [Bali](#), kata dia, hanya tinggal mengontrol bawahan untuk bekerja lebih baik dan juga menjalankan segala bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Ini kan tergantung bawahan juga. Kalau pimpinan sudah punya komitmen tapi bawahan tidak menjalankan, juga repot," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh pemda di [Bali](#) pada 2019 sudah dapat predikat patuh pelayanan publik atau berada di zona hijau.

Kini dari 9 kabupaten/kota yang ada di [Bali](#), hanya Tabanan yang masih berada di zona kuning. (*)